

**PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT DAYAK DALAM PENGELOLAAN
HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH (MEMBANGUN
SINERGI HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN
HUKUM NASIONAL DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)**

DISERTASI

Oleh
Ariyadi, S.H.I., M.H
NIM 170311020025



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2022 M**

**PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT DAYAK DALAM PENGELOLAAN
HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH (MEMBANGUN
SINERGI HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN
HUKUM NASIONAL DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Doktor

Oleh
Ariyadi, S.H.I., M.H
NIM 170311020025



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariyadi, S.H.I., M.H

NIM : 170311020025

Tempat/Tgl. Lahir: Masupa Ria, 20 Maret 1990

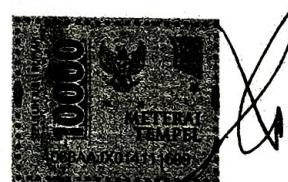
Program Studi : Ilmu Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul: "Prinsip-
"Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Hutan di
Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum
Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)" adalah benar-benar karya saya,
kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa
disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ariyadi, S.H.I., M.H.

PERSETUJUAN DISERTASI

PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH (MEMBANGUN SINERGI HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

Yang Dipersembahkan dan disusun oleh:

**Ariyadi
NIM 170311020025**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H
Tanggal, 29 Agustus 2022

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
Tanggal, 23 Agustus 2022

PENGESAHAN DISERTASI

PRINSIP-PRINSIP KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH (MEMBANGUN SINERGI HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Ariyadi
NIM 170311020025

Telah Diajukan kepada Dewan Pengaji
Pada: Selasa Tanggal 16 Agustus 2022

Dewan Pengaji

Nama

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A
(Ketua Pengaji)
2. Prof. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., Ph.D
(Pengaji Utama)
3. Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H
(Pengaji)
4. Dr. H. M. Ribani Satia, S.Sos., M.Si
(Pengaji Eksternal)
5. Mujiburrahman, M.A., Ph.D
(Pengaji)
6. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
(Pengaji)
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in. Lc., M.A
(Sekretaris Pengaji)

Tanda Tangan

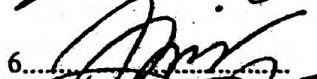
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Mengetahui,
Direktur

Prof. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., Ph.D
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

ARIYADI, NIM 170311020025, *Prinsip-prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., dan II: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: prinsip-prinsip, kearifan lokal, pengelolaan hutan, sinergi, hukum adat, hukum Islam, hukum nasional, lingkungan hidup

Deforestasi merupakan kegiatan penebangan kayu yang berskala besar sehingga mempercepat hutan dan alam mengalami kerusakan. Selain itu, kerusakan hutan dipengaruhi pula dengan adanya UU Cipta kerja yang lebih menekankan pengelolaan hutan pada investasi dari negara luar seperti hadirnya perusahaan tambang emas dan atau batu bara serta kebun kelapa sawit yang rata-rata milik masyarakat negara luar. Hal ini tentunya mengancam kesejahteraan masyarakatnya sendiri mengingat rata-rata kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju diambil dari hasil alam. Namun, dengan hadirnya UU Omnibus law yang memberlakukan denda terlebih dahulu dibandingkan hukuman, justru semakin menyudutkan masyarakat adat dan mempermudah pihak perusahaan. Pasalnya, dilihat dari kemampuan keuangan perusahaan bahwa nilai denda yang diberlakukan dianggap lebih ringan daripada biaya untuk membuka lahan dengan cara tanpa pembakaran hutan. Langkah yang diambil pemerintah ini justru memberatkan masyarakat adat sehingga masyarakat adat yang tidak mampu membayar denda, mau tidak mau harus menerima hukuman. Dalam hal ini pemerintah dianggap tidak komprehensif dalam mencermati kedudukan masyarakat adat dalam mengelola hutan sehingga banyak hal yang perlu dipahami oleh pemerintah terkait pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Pada dasarnya, masyarakat Dayak Ngaju, patuh dan taat pada aturan adat yang tentunya dapat menjaga keseimbangan hutan supaya tetap lestari. Konsepsi hutan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju mengandung falsafah hidup yang menghubungkan kehidupan seluruh makhluk dari alam atas, alam darat, dan alam bawah. Masyarakat Dayak Ngaju juga berkeyakinan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di bumi memiliki peran masing-masing dan saling bersinergi dalam menjaga keteraturan, kebaikan dan keseimbangan alam yang sebut “*pukung pahewan*”. Sinergi yang diciptakan oleh masyarakat Dayak Ngaju bertujuan untuk saling menjaga dan menghormati seluruh makhluk di muka bumi. Dengan demikian seluruh makhluk di bumi sama-sama menjaga hutan dan alam agar terhindarnya dari banjir, longsor, dan kekeringan. Berdasarkan fakta pada umumnya bahwa masyarakat adat mampu bertahan dengan ataupun tanpa investasi dari aturan yang dilayangkan dalam aturan Omnibus Law. Kemudian

dilihat dari fakta empiris, adanya ketidaksesuaian dan disharmoni norma dan implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk diteliti agar pemerintah mampu mencermati kedudukan masyarakat adat pada posisi yang tepat sehingga perlu dilakukan penelitian tentang sinergi hukum, yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan hutan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah? Bagaimana sinergi hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional dalam pembangunan lingkungan hidup? Penelitian ini tidak hanya difokuskan pada penggalian data pustaka. Namun, diarahkan pula pada penggalian data lapangan untuk memperkuat data-data yang akan diteliti dari berbagai sumber dan informasi. Dengan demikian penelitian ini kemudian diolah menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami suatu realitas organisasi tertentu dan fenomena yang terjadi dari perspektif berbagai pihak yang terkait.

Hasil penelitian diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, tentang prinsip masyarakat Dayak Ngaju yang dikupas dari *pukung pahewan* menerapkan 6 prinsip dalam manajemen sumber hutan, yaitu: *handel* (kesinambungan); *himba* (keanekaragaman); *sub arep (sistensi)*; *mihing* (organik); *hadat* (aturan ritual); dan *jipen* (hukum adat); dan *kedua*, ditemukan penggabungan dua kebijakan, yaitu *Top Down* dan *Bottom Up* dalam pembuatan undang-undang/peraturan daerah sehingga hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya diterapkan pemerintah saja tetapi juga diawasi oleh masyarakat adat. Dengan memperhatikan kesesuaian prinsip-prinsip masyarakat adat dalam memelihara dan menjadikan mereka sebagai garda terdepan untuk menguatkan lingkungan hidup. Konklusinya, teori sinergi ini mencoba memformulasikan cara membentuk peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengakomodasikan hukum nasional yang pembentukannya berdasar sinergi antara hukum adat dan hukum Islam (fikih bi'ah) yang melahirkan hukum nasional dengan memperhatikan berbagai aspek. Baik secara normatif maupun implementasinya dalam mengakomodasi semua kepentingan masyarakat adat, pemerintah maupun aspek agama.

ABSTRACT

ARIYADI, NIM 170311020025, The Principles of Local Wisdom Dayak Community in Forest Management in Central Kalimantan (Building Synergy of Customary Law, Islamic Law, and National Law in Environmental Management), under the guidance of the first supervisor: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., and the second supervisor: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., at the Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Keywords: principles, local wisdom, forest management, synergy, customary law, Islamic law, national law, environment

Forest deforestation which continues to erode the pace of natural destruction is a serious concern for researchers, this is exacerbated by the lack of a comprehensive perspective on the problem, as shown in the Omnibus Law on Job Creation, the fact that occurs in the reality is that the government fails to observe the position of indigenous peoples in the right position. Excessive praise for large-scale investments has so far shown the fact that it is very detrimental to indigenous peoples. The concept of forest in the Dayak indigenous contains a philosophy of life that all types of living things exist in nature and forests have their respective roles and functions. Whether in the form of plants, animals, or supernatural beings, which synergistically maintain the order, goodness, and balance of nature which is often called *pukung pahewan*. This is related to forests and nature to avoid floods, landslides, and droughts. Maintaining soil fertility can prevent natural disasters. Judging from the general fact that even without investment, indigenous peoples can survive and show high incomes. Then viewed from the empirical facts, it shows the occurrence of discrepancies and disharmony of norms and their implementation. Therefore, it is necessary to conduct research with the formulation of the problem, namely: What are the principles of local wisdom in forest management in the Dayak in Central Kalimantan? How is the synergy of customary law, Islamic law, and national law in environmental development?

This research was not only focused on extracting library data. However, it was also directed at extracting field data to strengthen the data to be studied from various sources and informants. Thus, this research was then processed using qualitative methods to describe and understand a particular organizational reality and phenomena that occur from the perspective of various related parties.

The results of this study were divided into two parts. First, regarding the principles of the Dayak Ngaju community which were discussed in the *pukung pahewan*, they applied 6 principles in forest resource management, namely: sustainability (*himba/tana*), diversity (*handiai*), subsistence (*arep*), organic (*mihing*), ritual (*hadat*), and customary law (*jipen*); and secondly, it was found that the combination of two theories, namely *Top-Down* and *Bottom-Up* in making laws so that national laws in the legislation were not applied by the government alone. However, it also needs to be adjusted to the principles of indigenous peoples in maintaining and making them the frontline and strengthening each other to protect the environment. In conclusion, this synergy

theory tries to formulate ways to form laws and regulations so that they can accommodate national law whose formation is based on the synergy between customary law and Islamic law (*fikih bi'ah*) which gives birth to national law by taking into account various aspects. Both normatively and in its implementation, it is hoped that it can accommodate all interests of indigenous peoples, government, and religious aspects.

ملخص البحث

أريادي ، ر.ق.ط.: 170311020025 مبادئ الحكم المحلية مجتمع داياك في إدارة الغابات في وسط كاليمانتان (بناء التأزر بين القانون العربي والشريعة الإسلامية والقانون الوطني في الإدارة البيئية)، رسالة الدكتوراه كلية الدراسات العليا، جامعة بنجارماسين الإسلامية الحكومية. المشرف الأول أ.د. أ.محيي حسن، والثاني د. غوستي مزينة. 2022

الكلمات المفتاحية: المبادئ، الحكم المحلية، إدارة الغابات، التأزر، القانون العربي، الشريعة الإسلامية، القانون الوطني، البيئة.

تعد إزالة الغابات نشاطاً واسع النطاق لقطع الأشجار يعمل على تسريع تدمير الغابات والطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر تدمير الغابات أيضاً بقانون خلق فرص العمل الذي يؤكد على إدارة الغابات على الاستثمار من البلدان الخارجية مثل وجود شركات تعدين الذهب أو الفحم ومزارع تخيل الزيت التي تملكها عموماً جهات خارجية. هذا بالتأكيد يهدد رفاهية المجتمع بالنظر إلى أن حياة مجتمع Dayak Ngaju يصدر من المنتجات الطبيعية. ومع ذلك، مع وجود القانون الشامل، الذي يفرض الغرامات قبل العقوبة، فإنه في الواقع يحكم على الشعوب الأصلية ويسهل الأمر على الشركات. انطلاقاً من القدرة المالية للشركة، أن قيمة الغرامة المفروضة تعتبر أخف منتكلفة تطهير الأرض بغير حرق الغابات. لقد أثبتت هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الشعوب الأصلية عبّاً، بحيث يتغير على السكان الأصليين غير القادرين على دفع الغرامات، بقبول العقوبة حتى. في هذه الحالة، تعتبر الحكومة غير شاملة في معالجة موقف الشعوب الأصلية في إدارة الغابات. فمن المفروض أن تفهم الحكومة كل الأشياء فيما تتعلق بإدارة الغابات التي يقوم بها السكان الأصليون. في الأساس، فإن مجتمع Dayak Ngaju مطيعون للقواعد العرفية لأجل الحفاظ على توازن الغابة بحيث تظل مستدامه. يحتوي تصور الغابة لدى مجتمع Dayak Ngaju الأصلية على فلسفة الحياة التي تربط حياة جميع الكائنات من العالم العليا وما على الأرض والعالم السفلي. يعتقد مجتمع Dayak Ngaju أيضاً أن جميع الكائنات الحية على الأرض لها أدوارها الخاصة وتتأثر مع بعضها البعض في الحفاظ على نظام الطبيعة وصلاحها وتوازتها والتي تسمى *pukung pahewa*. يهدف النظام الذي أنشأه مجتمع Dayak Ngaju إلى حماية واحترام جميع الكائنات على الأرض. وبالتالي، يهدف إلى التأثر في الحفاظ على الغابات معاً في النهاية والطبيعة لتجنب الفيضانات والآفات والأرضية والخفاش.

استناداً إلى الحقيقة العامة المتمثلة في أن الشعوب الأصلية قادرين على البقاء على قيد الحياة مع استثمار القواعد المنصوصة من القانون الشامل أو بدونها. ومن الحقائق التجريبية، هناك تناقض وتناقض في المعاير وتنفيذها.

لذلك، فإن الموضوع في حاجة ماسة للبحث ليتم التحقيق فيه حتى تكون الحكومة قادرة على مراقبة موقف الشعوب الأصلية في الوضع الصحيح بحيث والبحث حول التأزر القانوني، وهي: ما هي مبادئ الحكم المحلية في إدارة الغابات في مجتمع Dayak في وسط كاليمانتان؟ ما هو التأزر بين القانون العربي والشريعة الإسلامية والقانون الوطني في التنمية البيئية؟ لا يرتكز هذا البحث على استخراج بيانات المكتبة فقط. ومع ذلك، فهي موجهة أيضاً إلى استخراج البيانات الميدانية لتقوية البيانات المراد دراستها من مختلف المصادر والمخبرين. وبالتالي، تتم معالجة هذا البحث باستخدام أساليب نوعية لوصف وفهم واقع ظواهر منظمة معينة تحدث من منظور مختلف الأطراف ذات الصلة.

يتم تصنيف نتائج البحث إلى قسمين. أولاً، فيما يتعلق بمبادئ مجتمع Dayak Ngaju التي تم تحليتها من *pukung pahewan*، وتطبيق ست المبادئ في إدارة موارد الغابات، وهي: *handel himba* (الاستدامة؛ النوع؛)؛ *mihing sub arep* (إعانة؛ عضوي)؛ *hadat jipen* (قواعد الطقوس)؛ و *Top Down Bottom Up* في وضع القوانين المحلية، بحيث يتم تنفيذ القوانين الوطنية من قبل الحكومة، سياستين، وهما

بجانب الإشراف من قبل الشعوب الأصلية . امتنال مبادئ الشعوب الأصلية له آثار إيجابية في الحفاظ على الغابات وجعلهم في خط المواجهة لتعزيز البيئة. وللاستنتاج، تحاول هذه نظرية التأثر صياغة طرق تشكيل التشريعات، بحيث يمكن أن يستوعب القانون الوطني الذي يعتمد تشكيله على التأثر بين القانون العرفي والقانون الإسلامي (الفقه). فهذا القانون الوطني من خلال مراعاة مختلف التواهي، من الناحية المعيارية والناحية التنفيذية لمراعاة جميع مصالح الشعوب الأصلية والحكومة والجوانب الدينية معا.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Disertasi yang berjudul “Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Pengelolaan Huta di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan)” disusun untuk melengkapi sebagian dari tugas yang sekaligus merupakan persyaratan dalam mencapai derajat doktor pada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Sebagian hasil disertasi ini telah di publikasikan pada artikal anterior pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan buku yang diterbitkan oleh K-Media Yogyakarta.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mendapatkan bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang secara khusus ditujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah merestui pembahasan disertasi ini.
2. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022-2024.

3. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2017-2021 dan sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, yang sangat mencerahkan selama penulisan disertasi ini.
4. Dr. H. M. Ribau Satia, S.Sos., M.Si, selaku Penguji Eksternal pada ujian disertasi Prinsip-Prinsip Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Huta di Kalimantan Tengah (Membangun Sinergi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan)
5. Mujiburrohman, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022-2024.
6. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H, Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberi membimbing dan pengarahan yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan disertasi ini.
7. Dr. Nuril Khasyi'in, selaku sekretaris Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Seluruh guru besar dan dosen serta staf pada Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
9. Rektor, seluruh senat, dan seluruh dekan serta teman sejawat pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
10. Pejabat dan tokoh Agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan semua yang terkait langsung maupun tidak langsung dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.

11. Bapak Kandungku Ahmad, ibu kandungku Wahidah Almh, Bapak Mertuaku Ahmad Syarifuddin dan Ibu Norhayati, istriku Mariya Ulfah, S.E.I., M.E. dan anak-anakku tercinta Syauqia Hanifah dan Muhammad Fatih Zidan yang telah banyak mengorbankan waktu, memberikan do'a dan kasih sayang serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
12. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan do'a serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, Agustus 2022

Ariyadi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ـ	Hamzah	‘	Apostrof
يـ	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
.....و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba,

فَعَلَ fa`ala,

سُيِّلَ suila,

كَيْفَ kaifa,

حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىِّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِّ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُّ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ qāla,

- رَمَى ramā,

- قَيْلَ qīla,

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". (٦) kata *al-Baqarah* (البقرة)

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". (٧) kata *barakatuh* (بركاته)

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl,
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah,
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

- نَزَّلَ nazzala,
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu,
- الْقَلْمَنْ al-qalamu,
- الشَّمْسُ asy-syamsu,
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخِذُ ta’khužu,
- شَيْءٌ syai’un,
- النَّوْءُ an-nau’u

- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -
بِسْمِ اللَّهِ مَحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- **الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِللهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Definisi Operasional	17
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II PENGATURAN HUTAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. HUKUM NASIONAL TENTANG HUTAN	24
1. Hutan di Indonesia	24
2. Peraturan Perundang-undangan	31
3. Peraturan Perundang-undangan Hutan Nasional	34
B. HUKUM ISLAM	36
1. Hutan dalam Dialektika Sosiologi Islam.....	36
2. Fiqih Kontemporer Tentang Hutan	43
C. HUKUM ADAT	49
1. Pengertian Hukum Adat	49
2. Pengelolaan Hutan dalam Hukum Adat	51
3. Wilayah berlakunya hukum adat.....	59
4. Corak Hukum Adat	63
5. Kearifan Lokal Suku Dayak.....	66
6. Hukum Adat Masyarakat Dayak Ngaju dalam Pengelolaan Hutan	76
D. TEORI YANG DIGUNAKAN	82
1. Grand Teori tentang ' <i>Urf</i> '	83
2. <i>Middle</i> Teori tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	87
3. <i>Applied</i> Teori	96
a. Teori Konvergensi	96
b. Teori Tujuan Hukum	98
c. Teori Kepastian Hukum	99

BAB III METODE PENELITIAN TENTANG HUKUM ADAT TERKAIT PENGELOLAAN HUTAN DAN DINAMIKA YA DALAM PELAKSANAAN DI LAPANGAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	102
B. Lokasi Penelitian	107
C. Data dan Sumber Data	109
D. Prosedur Pengumpulan Data	112
E. Analisis Data	113
F. Pengecekan Keabsahan Data	117
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN TENTANG SINERGI PRINSIP KEARIFAN LOKAL (HUKUM ADAT), HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN	
A. Data Tentang Sinergi Prinsip Kearifan Lokal Terkait Hukum Adat.....	120
B. Pembahasan Tentang Prinsip Kearifan Lokal Hukum Adat	149
C. Pembahasan Tentang Sinergi Hukum Adat Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengelolaan Hutan	205
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	261
B. Saran	262
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	